DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. (1996). *Manguak Tabir Hukum.* Jakarta: Chandra Pratama.

Badrulzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis.* Bandung: Alumni.

_____ ,(1983). *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan.* Alumni.

_____ ,(1981). *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya.* Bandung: Alumni.

Fuady, M. (2001). *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis).* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hadjon, P. M. (2006). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia.* Surabaya: Bina Ilmu.

Harahap, Y. (1997). *Beberapa Tibjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____ , (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian.* Bandung: PT Alumni.

Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah.* Jakarta: Erlangga.

Mamudji, S. S. (1994). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Merokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum.* Yogyakarta: Liberty.

_____ , (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty.

_____ , (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Liberty.

Miru, A. (2000). *Prinsip-prinsip Hukum bagi Konsumen di Indonesia.* Surabaya: Universitas Airlangga.

Muhammad, A. (2010). *Hukum Perjanjian.* Bandung: Alumni.

_____ ,(1990). *Hukum Perikatan.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nasution, A. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar.* Jakarta: Diadit Media.

Neiuwenhuis. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan.* Surabaya: Universitas Airlangga.

Prodjodikoro, W. *Asas-Asas Hukum Perjanjian.* Bandung: Sumur.

_____ , (1991). *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu.* Bandung: Sumur.

Patrik Purwahid. (1994). Dasar-Dasar Hukum Perikatan. Bandung: Mandar Maju

Rahardjo, S. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia.* Bandung: Alumni.

Salim. (2003). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak.* Jakarta: Sinar Grafika.

Saputra, Y. (2009). *Sumber-Sumber Penerimaan Negara.*

Setiawan. (1979). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan.* Bandung: Alumni.

Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum).* Surakarta.

Satrio. (2001). *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku 1.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sidharta. (1999). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.* PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Soedewi, S. (1989). *Hukum Perjanjian Indonesia.* Yogyakarta: UII.

Soekamto, S. (1982). *Penganter Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Pres.

Soemarso, S. (2007). *Perpajakan Pendekatan Komprehensif.* Jakarta.

Soemitro, R. H. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta: Ghalia.

Sony Devano, S. K. (2006). *Perpajakan Konsep, teori, dan Isu.* Jakarta.

Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian Cetakan ke 12.* Jakarta: Intermasa.

_____ , (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermasa.

Sulastri, c. T. (1995). *Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen.* Jakarta.

Suryodiningrat, R. (1996). *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian.* Bandung: Tarsito.

Tjipto, F. (2004). *Strategi Pemasaran.* Yogyakarta.

Tjirosudibio, S. d. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta: PT Pradnya Paramita.

_____, (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Widjaja, G. d. (2001). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Tama.

_____, (2010). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian.* Jakarta: Rajawali.

Yodo, A. M. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: PT Raja Grafindo.

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang *Ketenagalistrikan*

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 19 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 9 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN.*

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 31 Tahun 2014 tentang *Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN*.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 33 Tahun 2014 tentang *Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN*.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 9 Tahun 2015 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN*.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN*.